

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah dibidang keuangan yang diperkuat dengan diperlakukannya Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dimana pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah yang berasal dari PAD. Secara substansi daerah memiliki otonomi dibidang keuangan bila PAD mampu berkontribusi terhadap total pengeluaran daerah sebesar 25%. Artinya daerah mampu menyediakan dananya sendiri sebesar 25 % dari total APBD.

Untuk merealisasikan otonomi dibidang keuangan maka pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan PAD yang bersumber dari Pajak dan retribusi daerah, laba BUMD dan optimalisasi penggunaan asset. Ranah kewenangan pemerintah daerah telah mencari sumber-sumber PAD terbatas. Hal ini terlihat dari pembatasan dalam penerimaan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan UU No 28 tahun 2008 tentang pajak dan retribusi daerah. Namun masih terbuka peluang besar meningkatkan PAD melalui instrument peningkatan laba BUMD dan penggunaan asset daerah dimana diarahkan pada pengelolaan oleh BUMD yang berbadan Hukum Perumda dan Perseroda.

Untuk kabupaten kota provinsi Jambi, otonomi daerah dibidang keuangan terlihat masih jauh dari harapan kecuali kota Jambi. Data tahun 2019 menunjukan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah kabupaten kota di provinsi Jambi memperlihatkan rata-rata sebesar 8,29% dimana kota Jambi memiliki kontribusi terbesar sebesar 23,15% sedangkan yang terendah adalah kota Sungai Penuh hanya 4,24%. Secara keuangan, hanya Kota Jambi yang layak memiliki otonomi dibidang Keuangan karena kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah hampir mendekati 25%. Tetapi 9 kabupaten kota lainnya hanya memiliki kontribusi kecil dibawah 10%. Hanya kabupaten Bungo yang memiliki kontribusi sebesar 10,40%.

Ini berarti kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah kabupaten kota masih perlu ditingkatkan lagi agar dapat memenuhi harapan otonomi daerah.

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah banyak faktor yang mempengaruhinya. Secara teknis faktor tersebut akan berhubungan dengan instrument penerimaan PAD yang diperbolehkan menurut UU No 28 tahun 2008 yang berkaitan dengan pajak dan retribusi dan ketentuan tentang Perumda dan Perseroda dalam tata kelola BUMD dan pengelolaan asset oleh BUMD. Namun secara makro penerimaan PAD berhubungan pula dengan faktor eksternalitas seperti kondisi ekonomi daerah. Tumbuhkembangnya ekonomi daerah akan berdampak terhadap penerimaan PAD. Kondisi ekonomi daerah ini yang tergambar pada indikator investasi daerah, infrastruktur daerah, wajib pajak daerah dan UMKM akan memberi dampak terhadap besaran perolehan PAD disetiap kabupaten kota di provinsi Jambi.

Upaya untuk mengkaji potensi PAD tidak akan lepas dari kajian faktor-faktor yang mempengaruhi PAD tersebut baik secara makro maupun secara mikro. Oleh karena itu diperlukan suatu telaah faktor-faktor yang mempengaruhi PAD kabupaten kota agar peningkatan PAD kabupaten kota tersebut dapat dilakukan. Pengkajian faktor-faktor yang mempengaruhi PAD tersebut akan berkaitan pula dengan tumbuh kembangnya Perekonomian daerah, sehingga akan diperoleh solusi untuk mendorong tumbuhkembangnya PAD dan kemandirian keuangan daerah kabupaten kota di provinsi Jambi. Untuk membahas lebih lanjut maka diperlukan riset yang lebih mendalam tentang analisis PAD dan hubungannya dengan Perekonomian daerah pada kabupaten kota di provinsi Jambi.

1.2. Perumusan Masalah

Sesuai dengan deskripsi yang di muat dalam latar belakang maka dirumuskan pointer permasalahan sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang mempengaruhi pendapatan asli daerah Kabupaten/kota di provinsi Jambi

2. Bagaimana hubungan pendapatan daerah dengan Perekonomian daerah provinsi Jambi

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah Kabupate/kota di provinsi Jambi
2. Untuk menganalisis hubungan pendapatan daerah dengan Perekonomian daerah provinsi Jambi

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademis : merumuskan faktor yang berperan dalam pendapatan asli daerah dalam ranah ilmu keuangan daerah
2. Manfaak Praktisi : Masukan bagi pemerintah kabupaten kota untuk merumuskan kebijakan peningkatan pendapatan daerah guna membiayai pembangunan daerah.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Perekonomian Daerah

Perekonomian Daerah diartikan sebagai upaya pemerintah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya daerah dimulai dari proses produksi, distribusi dan konsumsi yang tujuannya untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat. Bentuk ekonomi daerah dapat dilihat dengan memakai PDRB sebagai indikatornya.

2.1.2. Pendapatan Asli daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan membiayai pembangunan daerah. Instrumen PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli yang sah.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Halim, A (2007), kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu:

- 1) Pajak Daerah
 - a. Pajak Provinsi
 - b. Pajak Kabupaten/ Kota
- 2) Retribusi Daerah, terdiri dari: Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.
- 3) Hasil Perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah, yaitu: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan

kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/ atau pengadaan barang dan atau jasa oleh daerah.

2.1.3. Investasi

Investasi adalah penempatan sejumlah dana dengan harapan dapat memelihara, menaikkan nilai, atau memberikan return yang positif (Sutha, 2000). Menurut Lypsey (1997), investasi adalah pengeluaran barang yang tidak dikonsumsi saat ini dimana berdasarkan periode waktunya, investasi terbagi menjadi tiga diantaranya adalah investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang.

Investasi merupakan komitmen sejumlah dana pada suatu periode untuk mendapatkan pendapatan yang diharapkan di masa yang akan datang sebagai unit kompensasi. Unit yang diinvestasikan mencakup waktu yang digunakan, tingkat inflasi yang diharapkan dan ketidakpastian masa mendatang. Investasi merupakan penanaman modal di dalam perusahaan, dengan tujuan agar kekayaan suatu korporasi atau perusahaan bertambah. Investasi juga didefinisikan sebagai barang-barang yang dibeli oleh individu ataupun perusahaan untuk menambah persediaan modal mereka (Mankiw, 2000). Investasi berdasarkan teori ekonomi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang. Investasi adalah suatu komponen dari Produk Domestik Bruto. Fungsi investasi pada aspek tersebut dibagi pada investasi non-residential dan investasi residential. Investasi adalah suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga. Suatu pertambahan pada pendapatan akan mendorong investasi yang lebih besar, dimana tingkat bunga yang lebih tinggi akan menurunkan minat untuk investasi sebagaimana hal tersebut akan lebih mahal dibandingkan dengan meminjam uang.

2.1.3. Belanja Infrastruktur

Pembangunan suatu daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu pembangunan membutuhkan pendekatan yang tepat, guna menghasilkan pertumbuhan yang disertai pemerataan. Infrastruktur berperan penting dalam peningkatan investasi dan memperluas jangkauan partisipasi masyarakat, serta pemerataan hasil pembangunan. Kajian teori ekonomi pembangunan menjelaskan bahwa untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan ekonomi diperlukan sarana infrastruktur yang memadai. Infrastruktur juga merupakan segala sesuatu penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan suatu daerah.

Berdasarkan pasal 1 angka 65 PMK Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan atas PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang dimaksud Infrastruktur adalah fasilitas teknik, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Belanja Infrastruktur yang dimaksud merupakan belanja yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Belanja Infrastruktur Daerah dapat dihitung dari total belanja modal dan belanja pemeliharaan setelah dikurangi belanja dan pemeliharaan untuk aparatur seperti pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung pemerintahan yang mempunyai fungsi utama pelayanan administrasi dan kendaraan dinas.

2.1.4. Wajib Pajak

Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut berdasarkan pada undang-undang, pungutan dapat dipaksakan kepada subjek pajak yang tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya Menurut Undang-Undang Perpajakan Tahun Nomor 6

tahun 1983 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan berlakunya undang-undang tersebut maka yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan semakin tinggi dan pada akhirnya dapat meningkatkan penerimaan pajak.

2.1.5. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah kelompok usaha yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan menjadi sumber pendapatan masyarakat (Nurhayati, dkk, 2012). Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang komprehensif tentang Analisis Pendapatan Asli Daerah Dan Hubungannya Dengan Ekonomi Daerah Kabupaten Kota Diprovinsi Jambi belum didapat. Penelitian yang telah ada didapati meneliti secara parsial saja.

Hasil penelitian Putri, (2014) yang berjudul Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Belanja Modal, Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa dengan menggunakan model analisis data panel tahun 2007 – 2011 menyimpulkan bahwa PMDA, PMDN, Tenaga Kerja, belanja modal, infrastruktur berupa jalan aspal dan listrik, mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan infrastruktur jalan tidak beraspal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kurniawan, dkk , (2017) dalam penelitian Pengaruh investasi swasta dan pengeluaran pemerintah serta tenaga kerja terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitiannya yang menggunakan analisis jalur (*path analysis*) menunjukkan bahwa investasi berpengaruh langsung dan tidak signifikan terhadap pendapatan daerah kabupaten Kutai Barat.

Batik, K (2013), Analisis Pengaruh Investasi, PDRB, Jumlah Penduduk, Penerimaan Pembangunan, Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Lombok Barat. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa variabel investasi mempunyai pengaruh terhadap PAD.

Lutfiyah, (2016) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Bangkalan. Usaha Mikro Kecil Menengah berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bangkalan. Artinya semakin tinggi UMKM maka PAD semakin rendah, dan ada pengaruh signifikan pertumbuhan ekonomi dan UMKM terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini menggambarkan bahwa kedua variabel independen tersebut memberikan kontribusi atau implikasi dalam Pendapatan Asli Daerah.

Paramasivan dan Selvam (2013) hasil penelitiannya bahwa Usaha Mikro, Kecil dan menengah merupakan tulang punggung pembangunan ekonomi negara

menunjukkan bahwa untuk memenuhi kebutuhan lokal serta tuntutan global yang memiliki keunikan karakter dari produk dan jasa.

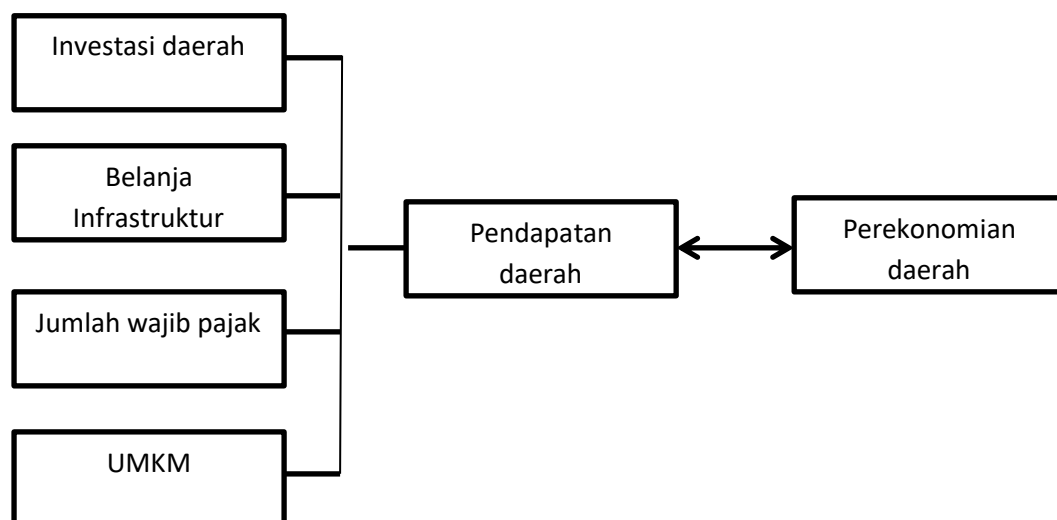
Setiawan, B (2020) Investasi dan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB-P2, sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PBB-P2.

2.3. Karangka Pikir

Untuk mewujudkan kemandirian keuangan daerah maka diupayakan menggali sumber-sumber potensi penerimaan daerah. Salah satu bentuk penerimaan daerah yaitu meningkatkan penerimaan asli daerah. Dalam penelitian ini mengkaji faktor – faktor yang mempengaruhi PAD.

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah banyak faktor yang mempengaruhinya. Secara teknis faktor tersebut akan berhubungan dengan instrument penerimaan PAD yang diperbolehkan menurut UU No 28 tahun 2008 yang berkaitan dengan pajak dan retribusi. Namun secara makro penerimaan PAD berhubungan pula dengan faktor eksternalitas seperti infrastruktur daerah, Investasi, wajib pajak dan UMKM dimana tumbuhkembangnya akan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penumbuhkembangan PAD mempunyai hubungan dengan Perkembangan ekonomi sehingga akan terwujudnya kemandirian Keuangan Daerah. Skema kerangka pikir dapat dilihat pada gambar dibawah ini

Gambar 3.1. Skema Kerangka Pikir



2.4. Hipotesis

1. Pendapatan daerah dipengaruhi oleh investasi daerah, Belanja infrastruktur, jumlah wajib pajak daerah, UMKM
2. Terdapat hubungan pendapatan Asli daerah dengan Perekonomian daerah

BAB III. METODE DAN TEKNIK PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah Analisis Data Sekunder dan obeservasi. Yang dimaksud dengan metode penelitian Analisis Data Sekunder adalah suatu metode dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber data utama. Memanfaatkan data sekunder yang dimaksud yaitu dengan menggunakan sebuah teknik uji statistik yang sesuai untuk mendapatkan informasi yang diinginkan yang bersumber dari instansi terkait.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk data panel, yaitu data terdiri dari dua bagian yaitu: *time series* dan *cross section*. Data *time series* adalah data tahunan yang dimulai dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 dan *cross section* adalah kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Sumber data dari Badan Statistik Provinsi Jambi dan instansi terkait yang memiliki hubungan dengan penelitian ini. Adapun data yang digunakan bersumber dari data kabupaten/kota tentang:

1. Investasi Daerah kabupaten/kota
2. Belanja Infrastruktur kabupaten/kota
3. Wajib Pajak Daerah kabupaten/kota
4. Jumlah UMKM kabupaten/kota
5. Pendapatan Asli Daerah kabupaten/kota
6. PDRB kabupaten/kota

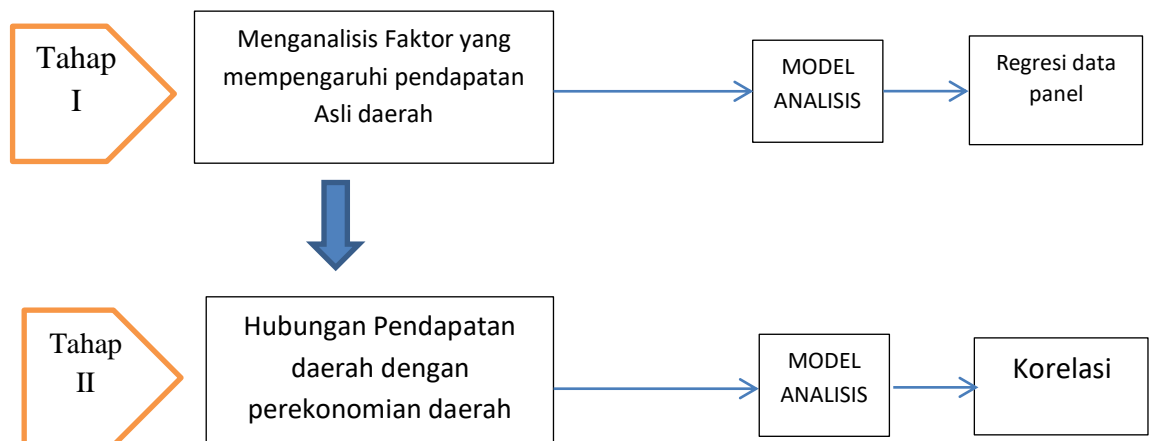
3.3 Tahapan Penelitian

Penelitian Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Hubungannya terhadap Perekonomian daerah kabupaten/kota Di Provinsi Jambi akan dilakukan selama 7 (tujuh) bulan dengan 2 kategori tahapan kegiatan. Kedua kategori tersebut adalah:

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan Asli daerah kabupaten/kota di provinsi Jambi memakai model Analisis Regresi Data Panel
2. Menganalisis hubungan pendapatan daerah kabupaten/kota di provinsi Jambi menggunakan analisis korelasi

Hubungan setiap tahapan kegiatan dengan keluaran akan tergambar dalam Bagan Penelitian secara keseluruhan. Bagan alur tersebut disajikan pada gambar berikut ini:

Gambar 3.1. Bagan Penelitian



3.4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan mengamati 10 kabupaten (Batang hari, Sarolangun, Merangi, Bungo, Muaro Jambi, Tebo, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, Sungai Penuh, Kerinci) dan 1 kota (Jambi) di provinsi Jambi dengan menggunakan data sekunder tahun 2013-2019.

3.5. Model Analisis Data

3.5.1. Model Analisis Pertama

Untuk menjawab tujuan pertama model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model regresi data panel sebagai berikut:

$$PAD_{it} = \beta_0 + \beta_1 IVS_{it} + \beta_2 B.Inf_{it} + \beta_3 WPD_{it} + \beta_4 UMKM_{it} + e$$

Dimana :

PAD	=	Pendapatan Asli Daerah
IVS	=	Investasi daerah
B. Inf	=	Belanja Infrastruktur Kabupaten/kota
WPD	=	Wajib Pajak Daerah Kabupaten/kota
UMKM	=	Jumlah unit usaha UMKM Kabupaten/kota
i	=	jumlah observasi di Provinsi Jambi => 11
t	=	Tahun data observasi (Tahun/deret waktu) => 10 tahun
β_i	=	koefisien (banyaknya peubah bebas) => 1,2,3
e	=	komponen error term

1. dalam agregasi yang luas.

Berdasarkan variasi-variasi asumsi yang dibentuk, terdapat tiga pendekatan dalam perhitungan model regresi data panel, yaitu:

1. *Metode common-constant (Polled Ordinary Least Square/PLS)*

Pendekatan PLS ini digunakan metode OLS biasa. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana. Dalam estimasinya diasumsikan bahwa setiap unit individu memiliki intersep dan slope yang sama (tidak ada perbedaan pada dimensi waktu). Dengan kata lain, regresi panel data yang dihasilkan akan berlaku untuk setiap individu.

2. *Metode Fixed Effect (Fixed Effect Model/FEM)*

Pada metode FEM, Intersep pada regresi dapat dibedakan antar individu dianggap mempunyai karakteristik tersendiri. Dalam membedakan intersepnya

dapat digunakan pengubah Dummy, sehingga metode ini dikenal dengan model least Square Dummy Variabel (LSDV).

3. *Metode Random Effect (Random Effect Model/REM)*

Berbeda dengan metode FEM, Pada Metode REM, β_{0i} tidak lagi dianggap konstan, namun dianggap sebagai peubah *random* dengan suatu nilai rata-rata dari β_1 (tanpa subscript I).

Pemilihan Model Regresi Data Panel:

1. Pemilihan antara model PLS dengan FEM

Untuk mengetahui apakah model FEM lebih Baik dibandingkan Model PLS dapat dilakukan dengan melihat signifikansi model FEM dapat dilakukan dengan Uji statistic F, Pengujian seperti ini dikenal dengan istilah *Uji Chow* atau *Likelihood Test Ratio*. Hipotesis nol (H_0) yang digunakan adalah intersep dan slope adalah sama. Adapun uji F statisticnya adalah sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{(RSS_1 - RSS_2) / n - 1}{(RSS_2) / (nT - n - k)}$$

Dengan n adalah jumlah individu, T merupakan jumlah periode waktu dan K adalah banyaknya parameter dalam model FEM: serta RSS1 dan RSS2 berturut turut adalah *residual sum of square* untuk model PLS dan model FEM.

Nilai statistic F akan mengikuti distribusi statistic F dengan derajat bebas sebesar n-1 untuk *numerator* dan sebesar nT-k untuk *denominator*. Jika nilai statistic F lebih besar dari nilai F table pada tingkat signifikan tertentu, hipotesis nol akan di tolak, yang berarti asumsi koefisien intersep dan slope adalah sama tidak berlaku, sehingga teknik regresi data panel dengan FEM lebih baik dari model regresi data Panel dengan PLS.

2. Pemilihan antara PLS dengan REM

Untuk mengetahui apakah model REM lebih baik dibandingkan model PLS dapat dilakukan dengan uji *Lagrange Multiplier* (LM Test) yang dikembangkan oleh Bruesc-Pagan. Pengujian ini didasarkan pada nilai residual dari PLS. Hipotesis nol (H_0) yang digunakan adalah intersep bukan merupakan

peubah random ataustokastik, dengan kata lain varian dari residual pada persamaan bernilai nol.

Adapun nilai statistic LM di hitung berdasarkan formulasi sebagai berikut

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T \{e_{it}\}^2}{\frac{n}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T e_{it}^2}} - 1 \right]$$

Dimana n adalah jumlah individu, T merupakan jumlah periode waktu dan e_{it} adalah residual metode PLS. Uji LM ini didasarkan oleh distribusi *Chi-square* dengan derajat bebas sebesar 1. Jika hasil statistic LM lebih besar dari nilai kritis statistic *chi-square*, maka hipotesis nol akan ditolak, yang berarti estimasi yang tepat untuk regresi data panel adalah metode REM.

3. Pemilihan antara Model FEM dengan REM

Untuk mengetahui apakah model Fixed effect lebih baik dari pada model Random Effect, digunakan uji *Hausman*. Dengan mengikuti criteria Wald, nilai Statistik *Hausman* ini akan mengikuti distribusi *chi-square* sebagai berikut :

$$W = x^2(K) = \{\widehat{\beta}, \widehat{\beta}_{GLS}\}' \Sigma^{-1} \{\widehat{\beta}, \widehat{\beta}_{GLS}\}$$

Statistic uji *Hausman* ini mengikuti distribusi statistic *chi-square* dengan derajat bebas sebanyak jumlah peubah bebas (p). hipotesis nol ditolak jika nilai statistic *Hausman* lebih besar dari pada nilai statistic *chi-square*, hal ini berarti bahwa model yang tepat untuk regresi data panel adalah model FEM.

Pemilihan Model regresi panel data.

1. Uji Chow untuk memilih antara Model PLS dengan FEM

Pengujian menggunakan *chow- test / likelihood ratio test*, yaitu :

H_0 = Model mengikuti pool

H_1 = Model mengikuti Fixed

Pengujian dilakukan dengan menunjukan baik F test maupun *Chi- square* signifikan dari alfa %5.

2. Uji Hausman untuk memilih antara Model REM dengan FEM

Hipotesis yang diuji adalah:

$H_0 = \text{Random Effect (individual Effect Uncorelated)}$

$H_1 = \text{Fixed Effect}$

Dengan statistic uji : $X^2_{hit} = (b - \beta) \text{Var}(b - \beta)^{-1} (b - \beta)$

Di mana : $b = \text{koefisien random effect}$ $\beta = \text{koefisien fixed effect}$

Keputusan : tolak H_0 jika $x^2_{hit} \geq x^2(k, \alpha)$ atau $p\text{-value} \geq \alpha$

Dimana k = jumlah koefisien (slope)

3.5.2. Model Analisis Kedua

Untuk menganalisis hubungan Pendapatan Asli daerah dengan Perekonomian daerah maka digunakan model analisis korelasi pearson (r person). Adapun formula matematis dari model tersebut adalah.

$$r = \frac{(n \cdot \sum yz) - (\sum y) \cdot (\sum z)}{\sqrt{[n \cdot (\sum y^2) - (\sum y)^2] \cdot [n \cdot (\sum z^2) - (\sum z)^2]}}$$

Dimana:

- r = korelasi person
- y = Pendapatan Daerah kabupaten/kota
- z = Ekonomi Daerah
- $\sum yz$ = jumlah perkalian variabel y dan z
- $\sum y$ = jumlah Pendapatan daerah
- $\sum z$ = jumlah ekonomi daerah
- $\sum y^2$ = jumlah pangkat 2 nilai variabel y
- $\sum z^2$ = jumlah pangkat 2 nilai variabel z
- $(\sum x)^2$ = jumlah nilai variabel x pangkat 2
- $(\sum y)^2$ = jumlah nilai variabel y pangkat 2
- n = banyak sampel

3.5. Operasionalisasi Variabel

Untuk membatasi ruang lingkup variabel yang ada, maka akan dijelaskan definisi operasional variabel dependen dan variabel independen sebagai berikut :

1. Investasi daerah adalah dalam pengeluaran bentuk penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing kabupaten/kota yang diukur dalam satuan Juta Rupiah dan diperoleh dari Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) kabupaten/kota Provinsi Jambi tahun 2013- 2019
2. Belanja Infrastruktur adalah total belanja modal dan belanja pemeliharaan setelah dikurangi belanja dan pemeliharaan untuk aparatur seperti pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung pemerintah yang mempunyai fungsi utama pelayanan administrasi dan kendaraan dinas.
3. Wajib pajak Daerah adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
4. UMKM adalah jumlah usaha unit usaha yang ada di kabupaten/kota di provinsi Jambi
5. Pendapatan Asli Daerah adalah Penerimaan yang di dapat daerah yang bersumber dari Pajak, Retribusi, Bagi hasil dan pendapatan lain yang sah kabupaten/kota di provinsi Jambi dalam satu tahun dengan satuan rupiah

BAB 5. JADWAL PENELITIAN

Penelitian tentang Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Hubungannya dengan Perekonomian Daerah, direncanakan memerlukan waktu 7 bulan. Deskripsi alokasi waktu untuk penelitian tersebut dimuat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1 Alokasi Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7
1	Penyusunan proposal							
2	Pengumpulan data sekunder							
3	Pengolahan dan analisis data							
4	Penyusunan laporan							
5	Seminar dan publikasi hasil penelitian							

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A (2007). *Akuntansi Sektor Publik*. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta
- Lutfiyah, (2016). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Ekonomi Pendidikan dan Kewirausahaan*. Vol 4 No. 2
- Lypsey (1997). Pengantar Makro Ekonomi. Jilid dua. Bina Rupa. Aksara. Jakarta.
- Kurniawan, A.I. - Militina, T & Suharto, R. B. (2017). Pengaruh Investasi Swasta dan pengeluaran pemerintah serta tenaga kerja terhadap pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Ekonomi Keuangan dan manajemen*. Vo. 13 No. 2
- Mankiw, N. G. (2000). Teori Makro Ekonomi. Erlangga. Jakarta
- Putri, P. I. (2014). Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Belanja Modal, Dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa. *Journal of Economics and Policy*. 7(2).
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jejak/article/view/3892/3534>
- Paramasivan, C. P & Mari S. (2013). Progress and Performance of Micro, Small and Medium Entreprises in India. *International Journal of Manajement Studies*, 2(4).
- Setiawan, B. (2020). Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan-P2 serta Pengaruhnya terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jambi. Tesis. Universitas Jambi.
- Sutha, (2000). Menuju Pasar Modal Modern. Yayasan Sad Satria Bakhti, Jakarta